

## **KEBIJAKAN EKONOMI SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (1959-1965)**

**Akhmad Syaekhu Rakhman, Arief Hidayat**

Universitas Indraprasta PGRI  
a03rakhman@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to analyze Soekarno's Economic Policy during the Guided Democracy period (1959-1965), understand the policies issued by the old order government which was centered on power, and understand the economic declaration policy which is the basic strategy of a guided economy which is part of the general strategy of the Indonesian revolution. The type of research used is the historical method with the stages of heuristics, verification, interpretation and historiography. The results of this study are to provide information about the impact of Soekarno's economic policies during the period of Guided Democracy 1959-1965*

**Keywords :** Soekarno, Economic Policy, Guided Democracy

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Ekonomi Soekarno pada masa demokrasi terpimpin (1959-1965), memahami kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan orde lama yang berpusat pada kekuasaan, serta memahami kebijakan deklarasi ekonomi yang merupakan strategi dasar ekonomi terpimpin yang menjadi bagian dari strategi umum revolusi Indonesia. Jenis penelitian digunakan adalah metode sejarah yaitu dengan tahap-tahap heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini yaitu memberikan sebuah informasi tentang dampak kebijakan ekonomi Soekarno pada masa demokrasi terpimpin 1959-1965

**Kata Kunci :** Soekarno, Kebijakan Ekonomi, Demokrasi Terpimpin

### **PENDAHULUAN**

Setelah proklamasi kemerdekaan 1945, Indonesia secara teoritis memiliki tiga model Demokrasi, yakni Demokrasi Liberal (tahun 1945-1959) Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dan Demokrasi Pancasila. Ketiga demokrasi itu turut mempengaruhi pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia (Maarif, 1996:198).

Situasi perekonomian Indonesia sekitar tahun 1945-1950-an sangat tidak menguntungkan bagi pemerintahan Republik Indonesia. Sistem perekonomian pada masa tersebut merupakan ekonomi perang gerilya terhadap penjajahan, bahkan ekonomi

masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan Belanda (Sjamsudin, 1993:226).

Pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet perlemeter serta kemelut politik. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan berdebatan berkepanjangan dalam konstituante. Walaupun partainya banyak namun tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem liberal tidak sesuai dengan akar budaya bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berdemokrasi (Budiardjo,

1972:69-70). Itulah sebabnya kemudian dikenal dengan istilah "Kabinet Jatuh Bangun". Selama Demokrasi Liberal ini posisi Soekarno hanya sebagai simbol dari kekuasaan politik tertinggi. Soekarno tidak mempunyai wewenang dalam pemerintahan sehingga tidak memuaskannya hatinya. Situasi ini menjadi kesempatan Soekarno untuk mengambil alih pucuk pimpinan, meninggalkan sistem parlementer yang selama tujuh tahun berjalan dirasakan tak memberikan solusi yang baik. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1945, Republik Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara (Sjamsuddin, 1993:228).

Dan sejak itu pula diterapkan model Demokrasi Terpimpin yang diklaim sesuai dengan ideologi Pancasila negara dan pemahaman integralistik yang mengajarkan tentang kesatuan antara rakyat negara. Pada era kemerdekaan ini banyak partai-partai yang bermunculan dan meramaikan kepolitikan di Indonesia.

Tetapi meskipun sistem politik Indonesia tahun 1957 memiliki kelemahan-kelemahan namun rakyat Indonesia telah mendapatkan suatu kemenangan yang luar biasa, dapat dilihat dari tersebarannya bahasa Indonesia dengan cepat, pendiskreditkan identitas-identitas politik kedaerahan atau kekuasaan yang selama ini selalu diupayakan oleh pihak Belanda pada federalisme selama revolusi, ditekan terus menerus, persatuan nasional oleh Soekarno, kemudian pada tahun 1957 setelah percobaan Demokrasi mengalami banyak kegagalan, Indonesia mengalami masa-masa kerisis, di tengah-

tengah krisis diambil langkah-langkah menuju suatu bentuk pemerintahan yang oleh Soekarno dinamakan Demokrasi Terpimpin. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Peresiden Soekarno menetapkan konstitusi dibawah Dekrit Peresiden Soekarno memperkuat tangan angkat bersenjata dengan mengangkat para Jendral ke polisi-polisi yang penting. PKI menyambut Demokrasi Terpimpin Soekarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalisme agama Islam dan komunisme yang di namakan NASAKOM.

Dekrit Presiden 5 Juli 1945 adalah dekrit yang mengakhiri Demokrasi Liberal, merupakan titik awal demokrasi Soekarno. Presiden pertama yang memerintah Indonesia pada periode 1945-1966, sosok yang terkenal sebagai penyambung lidah rakyat. Mampu bersosialisasi langsung dengan rakyat. Presiden yang memiliki semangat nasionalisme yang besar dalam membangun bangsa. Seorang pemimpin dikatakan dapat memajukan negaranya jika dapat mensejahterakan rakyatnya dapat membangun perekonomian bangsanya (Ditjindro, 2012:5).

Dengan adanya Dekrit Presiden tersebut, Soekarno mendengungkan untuk kembali ke Revolusi, melaksanakan sosialisme ala Indonesia yang bebas dari Imperialisme dan kolonialisme. Demokrasi Terpimpin dari Soekarno ini menginginkan masyarakat yang adil dan Makmur yang memajukan perekonomian bangsa dengan kekuatan rakyat

tampa ada campur tangan bangsa asing (Dhakidae, 2013:122).

Soekarno seorang pemimpin yang mencanangkan sosialisme sebagai azas pembangunan. Begitu juga dimasa ekonomi terpimpin, konsep sosialis Indonesia yang dikumandangkan Soekarno merupakan orientasi dalam strategi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia (Hendarseh, 2010:216).

Soekarno juga menguraikan ideologi Demokrasi Terpimpin yang dinamakan Manipol (Manifesto Politik) yang menyerukan semangat revolusi, keadilan sosial, dan retooling Lembaga-lembaga dan organisasi- organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan. Ideologi ini kemudian ditambahkan dengan kata USDEK yang berarti Undang-Undang Dasar 1945 yang intinya Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia (Ricklefs, 2007:403).

Istilah Ekonomi Terpimpin, secara konseptual sebagaimana yang disinggung Lewis dalam bukunya *Dasar-dasar Perencanaan Ekonomi Negara* memperlihatkan bahwa Ekonomi Terpimpin yang sering di terjemahkan sebagai ekonomi berencana dan biasa terdapat dimana saja, baik di Negara Sosialis maupun di Negara Liberal (Amiruddin, 2014:32).

Konsep sosialis Soekarno seperti yg disebutkan (Soesastro, 2005:23) merupakan susunan sistem ekonomi Indonesia yang dapat menciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari

sisa Imperialisme dan Feodalisme, dan tahap kedua yakni tahap Ekonomi Sosialis Indonesia, ekonomi tanpa menghisapkan manusia oleh manusia. Hal ini berarti sebagai negara yang ingin membangun dan menuju masyarakat Sosialisasi Indonesia kita harus bersih dari sisa Imperialisme dan Feodalisme. Menggerakkan semua potensi yang ada untuk meletakkan dasar dan mempertumbuhkan ekonomi nasional.

Ekonomi Terpimpin dalam masyarakat Sosialis Indonesia ini mengacu pada "Pasal 33 1945" Soekarno mengatakan bahwa Ekonomi Terpimpin menghendaki kegotong royongan di bidang ekonomi. Menurut Soekarno sistem ekonomi itu mengandung tiga unsur yakni kepentingan bersama yang ditetapkan bersama, usaha bersama yang dilaksanakan bersama, dan pemimpin bersama yang dimufakati bersama (Alam, 2003:453).

Sosialisme Indonesia adalah gotong royong berdasarkan Pancasila. Ditambah lagi bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya. Hal inilah juga yang membuat Soekarno berpikir akan adanya ekonomi berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) sebuah negara yang harus dapat membangun ekonomi sendiri, bersama-sama rakyat dan pemimpinnya (Rahardjo, 2001:288).

Para pemimpin di Indonesia menginginkan perkembangan ekonomi yang baik bagi negeri, tentu saja pemikiran para tokoh-tokoh penting saat itu sangat

mempengaruhi kebijakan ekonomi. Dalam kesempatan kali ini penulis akan mengkaji kondisi ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin, menurut pemikiran yang berkembang dari toko terkait yaitu Peresiden Soekarno. Penulis memilih pemikiran Soekarno karna sebagai “pemimpin demokrasi”, Soekarno telah menjadi tokoh yang paling berpengaruh pada masa pemerintahan Demokrasi Terpimpin dengan kediktatoranya yang segalanya berpusat pada kepemimpinanya (politik Soekarno).

Pemikiran-pemikiran Soekarno inilah yang berpengaruh besar terhadap kebijakan perekonomian masa Demokrasi Terpimpin. Penulis ingin mengetahui konsep ekonomi seperti apa dari sosok Soekarno yang nantinya akan memunculkan keadaan ekonomi beserta implementasi kebijakan ekonomi Indonesia tahun 1959-1965. Dalam penelitian ini penulis ingin mengambil ruang lingkup temporal tahun 1959-1965 yang diambil sebagai masa Demokrasi Terpimpin, karena pada masa tersebut Indonesia mengalami kesenjangan dan kemerosotan ekonomi.

#### **METODE PENELITIAN**

Riset ini menggunakan metode sejarah buat menarangkan tentang Kebijakan Ekonomi Soekarno Pada Massa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) . Tahap-tahap dalam menggunakan metode sejarah ini merupakan sesi heuristik, kritik, interpretasi, serta historiografi. Sesi awal ialah heuristik, data- data dikumpulkan dari buku serta koran. Pengumpulan data- data ini diperoleh lewat riset kepustakaan.

Dari data- data yang terkumpul serta relevan dengan tema riset yang dicoba, setelah itu dicoba pengujian kritik buat mendapatkan kenyataan yang akurat serta bisa dipertanggungjawabkan. Sesi berikutnya merupakan interpretasi, ialah pengertian terhadap data- data yang telah diverifikasi sehingga menciptakan kenyataan sejarah. Berbagai kenyataan yang diperoleh dirangkai serta dihubungkan satu sama lain sehingga jadi satu kesatuan yang utuh serta logis. Sesi selanjutnya ialah penyusunan sejarah, dalam sesi terakhir ini ialah kerangka penyusunan sejarah yang sudah tercipta setelah itu disusun jadi historiografi (Gottschalk, 2008).

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keadaan ekonomi Indonesia pada masa awal kemerdekaan sangatlah rumit. Saat itu bangsa Indonesia dihadapkan pada hal yang rumit yaitu masih adanya campur tangan dari bangsa kolonial, sehingga menjadi kendala dalam mengatur perekonomian bangsa . Adapun beberapa kendala yang dihadapi bangsa Indonesia dari segi ekonomi pada masa tersebut adalah masalah menentukan mata uang yang diberlakukan, adanya blokade yang dilakukan oleh Belanda terhadap ekspor RI Masalah rendanya penghasilan rakyat sehingga tingkat kemiskinan sangat tinggi (Poesponegoro,1993:243 ). Perekonomian Indonesia sekitar tahun 1945-1950-an sangat tidak menguntungkan bagi pemerintahan Republik Indonesia.

Sistem perekonomian Situasi pada masa tersebut merupakan ekonomi perang gerilya terhadap penjajahan

bahkan, ekonomi masih dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan Belanda (Sjamsuddin,1993:226). Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan zaman kolonialisasi. Prekonomian Indonesia masih sangat buruk, hal ini karena pengaruh Jepang dan Belanda. Selain itu bangsa Indonesia juga memasuki era yang sangat sulit, karena bangsa Indonesia menghadapi gejolak sosial, politik, dan keamanan yang besar, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang diperhatikan. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat minim, perusahaan-perusahaan besar saat itu merupakan perusahaan peninggalan penjajah yang mayoritas milik orang asing, dimana produk berorientasi pada ekspor. Perkebunan-perkebunan dan instalasi-instalasi diseluruh negeri rusak. Dan yang paling penting adalah laju pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat (Ricklefs,2005:358).

Tahun 1950-an pada dasarnya Indonesia belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah berupa rehabilitasi struktur perekonomian. Para pemimpin berusaha memperbaiki perekonomian yang tindak lanjut pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan tidak stabil dengan melakukan program yang lebih menekankan pada pemulihan dan perbaikan keadaan. Pada masa itu para pemimpin belum memikirkan dan mengupayakan penduduk (Leirissa,1996:93).

Soekarno beserta tokoh lainnya berhasil merumuskan

Pancasila sebagai sebuah ideologi negara yang sesuai dengan pandangan hidup dan cita-cita bangsa Indonesia. Sebuah cita-cita yang tertuang dalam rumusan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 berkomitmen untuk memerdekakan seluruh rakyat Indonesia. Baik secara politik, ekonomi maupun sosial budaya. Sehingga terciptanya bangsa Indonesia yang bebas merdeka dari segala bentuk penjajahan dan terpenuhinya hak sebagai warga negara untuk hidup baik

Kemerdekaan sampai pada masa Demokrasi Parlementer mempunyai hubungan yang berkesinambungan. Soekarno tidak menyetujui Demokrasi Liberal, idenya tentang partai tunggal sudah muncul sejak awal Gagasan Soekarno yang dilontarkan sejak zaman pergerakan, awal kemerdekaan meskipun tidak ditanggapi secara positif. Hingga pada akhirnya mengambil tindakan berupa dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945.

Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden, dimulailah sistem Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Soekarno tidak dapat menghindari tantangan maupun ketegangan-ketegangan yang terjadi baik dalam bidang sosial,ekonomi dan politik. Perekonomian Indonesia pasca proklamasi hingga memasuki tahun 1950an masih ada campur tangan bangsa kolonial dan masih dimonopoli bangsa asing. Situasi dan kondisi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia mendorong Soekarno untuk mencetuskan pemikiran-pemikiran untuk memperjuangkan kemerdekaan



dan kesejahteraan rakyat yang bebas dari imperialisme dan kolonialisme (Sjamsuddin,1993:216).

Pemikiran Soekarno di bidang ekonomi mengantar Indonesia menjadi negara yang memiliki ideologi ekonomi berlandaskan anti- kapitalisme, penguatan peran negara dan kedaulatan ekonomi (Dhakidae,2013:118). Soekarno memperlihatkan bahwa untuk mencapai Indonesia yang benar-benar merdeka maka, rakyat Indonesia harus bergerak menghancurkan kapitalisme dan imperialisme. Pidato Bung Karno yang berjudul Deklarasi Ekonomi pada 28 Maret 1963 banyak memuat pemikiran dasar strategi ekonomi. Bung Karno mencoba menggunakan analisa Marxisme untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi Indonesia. Soekarno mengungkapkan kedaulatan politik dan berkepribadian dalam kebudayaan tidak mungkin diraih bila tak berdikari dalam ekonomi. Begitu pula dengan kemandirian ekonomi, tidak dapat dilaksanakan bila bangsa kita tak ada kedaulatan secara politilk serta berkepribadian dalam kebudayaan

Berdikari yang digagas Bung Karno tidak hanya sebagai tujuan, tapi juga sebagai prinsip dari cara mencapai tujuan. Dimana, prinsip untuk melaksanakan pembangunan dengan tidak menyandarkan diri kepada bantuan negara atau bangsa lain. Tentunya nilai-nilai kemandirian ini bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Dengan demikian, nilai kemandirian dalam pemikiran ekonomi berdikari, Bung Karno berusaha

memunculkan pemecahan persoalan ekonomi. Yakni dengan harapan, rakyat bisa berdaulat terhadap persoalan-persoalan ekonomi. Sebagaimana pernyataanya dalam amanat proklamasi. Perasaan dan pikiran saya sederhana, amat sederhana sekali. Boleh dirumuskan sebagai berikut : Kalau bangsa- bangsa yang hidup di padang pasir yang kering dan tandus bisa memecahkan persoalan ekonominya, kenapa kita tidak (Hendarseh, 2010:99).

Soekarno memiliki konsep ekonomi yang disebut dengan Ekonomi Berdikari. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah yang menurut Soekarno bisa dibangun ekonomi berdikari (berdiri diatas kaki sendiri). Dengan kekayaan yang ada akan dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi barang-barang yang bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.

Pada tanggal 24 Desember 1963, Presiden Soekarno menerbitkan penetapan Presiden Nomor 12 tahun 1963, yang berisi pengintegrasian Dewan Perancang Nasional ke dalam kabinet kerja dan bentuknya sebuah lembaga yaitu Badan Perancang Pembangunan Nasional (BPPENAS). Adapun tugas BAPPENAS adalah :

- a. Menyusun rencana pembangunan nasional jangka panjang, termasuk rencana pembangunan daerah dan pembangunanmasyarakat desa.
- b. Menyusun rencana pembangunan tahunan.
- c. Mengkordinasi semua

usaha persiapan perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan.

- d. Menilai dan mengawasi pelaksanaan rencana pembangunan.
- e. Melakukan usaha-usaha penelitian dan penyelidikan untuk keperluan perencanaan pembangunan.
- f. Menyempurnakan pola perencanaan semesta berencana pertama.

Sejalan dengan perubahan landasan paradigma penyelenggaraan negara dan pembangunan, panduan pokok perencanaan pembangunan periode 1959-1965 adalah Manipol-Usdek, sedangkan lembaga yang bertanggung jawab dalam menyusun perencanaan pembangunan adalah Depermas/Bappenas. Setelah MPRS menetapkan Manipol-Usdek sebagai GBHN pada 1960, Depermas menyusun dan Menjabarkan Rancangan Dasar Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan (Mustopadidjaja dkk, 2012:88).

Kebijakan pembangunan yang sebagaimana tercantum dalam RPNSB tahapan 1 terbagi menjadi enam bagian yaitu : agama, kesejahteraan, pemerintahan dan keamanan, produksi, distribusi dan perhubungan, keuangan dan pembiayaan. Dalam bidang produksi kebijakan yang dilakukan adalah :

- a. Pengutamakan bahan keperluan hidup rakyat yang pokok Cabang-

cabang produksi yang vital untuk perkembangan perekonomian nasional

- b. Mengikutsertakan rakyat dalam pengerahan semua modal dan potensi

Sedangkan dalam bidang distribusi dan perhubungan kebijakan adalah :

- a. Menyelenggarakan tata distribusi barang-barang keperluan hidup sehari-hari agar cepat sampai ketangan rakyat, murah dan merata
- b. Mengatur dan menyalurkan distribusi bahan-bahan penting bagi kehidupan rakyat
- c. Menyelenggarakan impor bahan-bahan kebutuhan pokok untuk rakyat

Kebijakan dalam bidang keuangan diantaranya :

- a. Sumber pembiayaan bagi pembangunan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri
- b. Mengadakan kerjasama ekonomi
- c. Menata sistem moneter yang sehat

Wujud struktur ekonomi masa depan harus dilakukan melalui perencanaan yang sistematis. Disinilah diperlukan adanya perencanaan nasional dan suatu lembaga Perencanaan Nasional. Hal ini tidak terlepas dari tugas konstitusional (pasal 33 UUD 1945) yang menegaskan

bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Hal ini menurut Soekarno merupakan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi. Soekarno menganggap perlunya Perencanaan Nasional seperti Depneran dan Bappenas (Sjamsuddin, 1993:218)

Soekarno sangat menjunjung tinggi keberdikarian. Soekarno berorientasi terhadap kekuatan rakyat, pada potensi dalam negeri sendiri sebagai landasan pembangunan nasional. Program Bappenas belum sepenuhnya memperbaiki perekonomian Indonesia. Ekspor dan impor Indonesia mengalami penurunan yang menyebabkan terjadinya defisit. Untuk mengatasinya mengeluarkan dan mencetak uang baru sehingga uang yang beredar pun semakin bertambah banyak tanpa diimbangi penambahan barang, sepanjang tahun 1960-1965 inflasi semakin meningkat, untuk mengatasinya Soekarno memaklumkan berlakunya 14 peraturan pokok Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada 28 Maret 1963.

Deklarasi Ekonomi bertujuan untuk mengatasi keadaan ekonomi Indonesia, sehingga mendukung proses pembangunan di Indonesia, selain itu mencanangkan Deklarasi Ekonomi (Dekon) diharapkan dapat mengatasi laju inflasi. Tujuan yang hendak dicapai bukanlah sekedar mencetuskan suatu terobosan ekonomi, melainkan untuk mendorong perkembangan masyarakat secara menyeluruh artinya untuk mencapai “Demokrasi Nasional” yang kemudian akan menuju tahap

sosialis Indonesia (Sjamsuddin, 1993:238).

Dalam mengatasi krisis ini pemerintah menggunakan berbagai cara diantaranya adalah menggagas adanya Deklarasi Ekonomi (Dekon) pada tahun 1963. Dekon ini mempunyai program dengan bekerja membuat berbagai kebijakan diantaranya adalah :

1. Diciptakan susunan ekonomi yang bersifat nasional dan demokratis, yang bersih dari sisa-sisa Imperialisme dan Feodalisme.
2. Ekonomi sosialis Indonesia, ekonomi tanpa penghisapan manusia oleh manusia. Dimana tiap orang dijamin mendapat pekerjaan, sandang pangan, perumahan serta kehidupan kultural dan spiritual yang layak (Lubis, 1988:77).

Deklarasi Ekonomi membenarkan pentingnya untuk memperbaiki potensi rakyat dan untuk mewujudkan cita-cita ekonomi sosialis Indonesia itu bisa tercapai setelah Imperialisme dan Feodalisme dapat dihancurkan secara total baik didalam negeri maupun diluar negeri Indonesia sendiri.

Inti dari Dekon ini adalah berusaha mencegah terjadinya penyelewengan dalam penyelenggaraan pembangunan kemandirian ekonomi, dimana pembangunan kemandirian ditujukan untuk kepentingan rakyat dan bukan untuk kepentingan golongan ataupun pribadi. Namun produk dari dekon tersebut pada saat terakhir diubah oleh kelompok komunis dengan memasukkan anak kalimat penting yaitu fokus



harus diberikan pada anti-imperialisme. Akibatnya dalam perkembangan ekonomi tidak terjadi perubahan apa-apa (Djiwandono dkk,2005:16).

Deklarasi Ekonomi kemudian disusul dengan pengaruh Dana Moneter Internasional. Peraturan yang dikeluarkan saat itu menampilkan pendekatan ekonomi terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Pada awal pelaksanaa Deklarasi ini terjadi laju kenaikan biaya hidup 500%, dua bulan kemudian menjadi datar dan laju inflasi dapat sedikit ditekan.

### **Kesimpulan**

Pada masa sebelum Demokrasi Terpimpin Indonesia dihadapi oleh beberapa kendala, diantaranya masalah menentukan mata uang yang diberlakukan, adanya blokade yang dilakukan oleh Belanda terhadap ekspor RI, masalah rendahnya penghasilan rakyat sehingga tingkat kemiskinan sangat tinggi. Disamping itu perekonomian Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi kolonial dan juga masih dimonopoli oleh perusahaan Belanda.

Dalam pemikirannya Soekarno banyak belajar dari ajaran Karl Marx tentang marxisme, namun Soekarno hanya menggunakan pendekatan ilmiahnya saja dalam penyelenggaraan sistem politik dan ekonomi. Konsepsinya mengenai Ekonomi Terpimpin, yang nantinya dituangkan baik dalam Manipol-USdek. Rencana Pembangunan Semesta dan juga Dekon. Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan

ekonomi ini hanya akan berhasil dengan dukungan massa rakyat. Dalam usaha memassifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti yang berisikan : berdikari dibidang ekonomi, berdaulat dibidang politik, berkepribadian dalam budaya kemudian pada peringatan 17 Agustus 1959, Soekarno berpidato tentang penemuan Kembali Revolusi Kita, yang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Dalam pidato tersebut, secara garis besar, Soekarno mencanangkan dilaksananya sistem Demokrasi Terpimpin. Pada intinya manipol terdiri atas lima hal pokok, yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Keperibadian Indonesia yang disebut USDEK. Sejak saat itu, setiap gerak dan langkah seluruh komponen bangsa Indonesia diharuskan berdasar pada Manipol-USDEK. Oleh karena itu, sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam ekonomi terpimpin, kegiatan perekonomian ditekankan pada konsepsi gotong royong dan kekeluargaan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 33 UUD 1945.

Seiring dengan perubahan politik menuju Demokrasi Terpimpin maka ekonomipun mengikuti ekonomi terpimpin, sehingga ekonomi terpimpin merupakan bagian dari Demokrasi Terpimpin. Dimana semua aktivitas ekonomi disentralisasikan di pusat pemerintahan sementara daerah merupakan kepanjangan dari pusat

### **Daftar Pustaka**

- Advendi.2000.*Hukum dalam Ekonomi.* Jakarta : Grasindo
- Amirudin, 2014. *Ekonomi Berdikari Sukarno.* Depok: Komunitas Bambu.
- Anwar, Rosihan. (1996). *Revolusi Indonesia : Sejarah Pengantar Indonesia.* Jogjakarta:Bentang
- Budiardjo, Miriam. 1972. *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Benda, H.J. (1985) *Bulan Sabit dan Matahari Terbit.*
- Badrika, I Wayan. 2000. *Sejarah Nasional Indonesia dan umum,* Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Dekker, I Nyoman. 2003. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia,* Jakarta: Pustaka Ilmu
- Kuntowijoyo. (2001) *Pengantar Ilmu Sejarah.* Bentang. Yogyakarta.
- Kenichi, (1998) *Jepang dan Pergerakan Kebangsaan Indonesia.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kahin, M. Goerge. (1995) *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia.* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Kartodirdjo, Sartono. (1992) *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah.* Jakarta: PT.Gramedia.
- Lucas, Anton. (1989) *Peristiwa Tiga Daerah: Revolusi dalam Revolusi.* Jakarta: Pustaka
- Malaka, Tan (2000) *Dari Penjara ke Penjara Bagian II.* Jakarta: Teplok Press
- Nasution, Saefullah. (1987) *Sejarah Pendidikan Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara
- Noer ,Deliar. 1986. *Perkembangan Demokrasi Kita, dalam M. Amin Rais, Demokrasi dan Peroses Politik.* Jakarta: LP3ES. Odih, Enjang. 1998. *Sejarah Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Onghokham. 1978. *Manusia dalam kemelut sejarah,* Jakarta: LP3ES
- Suryabrata,Sumardi,1997. *Metode Penelitian.* Jakarta:Rineka Cipta
- Ricklefs, MC. (2003) *Sejarah Indonesia Modern 2001-2004.* Jakarta : Serambi Ilmu
- Amiruddin, (2014) *Ekonomi Terpimpin 1957-1965:Mencari Jalan Baru Indonesia.* Skripsi Pembangunan. Sarjana Universitas Indonesia
- Nibras, Nailufar. 2020. *Kebijakan Ekonomi Ekonomi Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin.* Kompas, hlm 12-15.
- Siti Rifatul Amalia. 2018. *Hubungan ekonomi Indonesia-Amerika Serikat dalam bidang impor hasil pertanian pada masa Demokrasi Terpimpin.* Jurnal nasional. 6 (2): 75-83